

ADD dan Insentif Aparatur Desa Naik



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 08/07/2024

SANGATTA – Angin segar untuk pemerintahan desa. Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan kabar menggembirakan terkait peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD).

Hal itu disampaikan saat peresmian Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Sabtu (6/7/2024).

Seluruh Kepala Desa dan Aparatur Desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), akan menerima kenaikan insentif melalui APBD Perubahan.

“Kenaikan ADD berdampak pada peningkatan insentif bagi Kepala Desa dan seluruh Aparatur Desa, termasuk kepala dan anggota BPD, serta LPM. Bahkan, ketua adat juga akan menerima kenaikan insentif,” ujar Ardiansyah di hadapan para hadirin.

Lebih lanjut, bupati Ardiansyah menekankan pentingnya peran ketua RT dalam menyelesaikan masalah keluarga di masyarakat.

“*Alhamdulillah*, insentif Ketua RT juga naik. Selain itu, untuk Kapolsek dan Ramil beserta jajarannya, kami akan menyediakan kendaraan operasional, setidaknya roda dua, sementara Polsek akan menerima kendaraan roda empat,” jelasnya.

Sejak 2021, APBD Kutai Timur mengalami defisit. Namun, berkat kerja sama dan upaya yang konsisten, kondisi ini berhasil diatasi.

“Tahun 2021, kita menghadapi banyak defisit. *Alhamdulillah*, semua bisa diselesaikan. Pada tahun 2022, APBD kita naik menjadi Rp3,8 triliun, mengatasi defisit yang sebelumnya dialami. Saya berharap seluruh dinas dan instansi bekerja keras dengan

program yang telah direncanakan. Kenaikan fiskal Kutim sejak 2022 sangat signifikan,” jelas Ardiansyah.

Pada 2023, APBD Kutai Timur mencapai Rp5,8 triliun, dan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp9,1 triliun. “*Alhamdulillah*, dengan izin Allah, segala sesuatunya dipermudah,” tambahnya.

Bupati Ardiansyah juga menyoroti keberhasilan Kutim dalam mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kutim adalah satu-satunya di Indonesia yang mampu mengangkat seluruh PPPK tahun ini. Kemampuan daerah kita memungkinkan hal ini terjadi, sementara daerah lain hanya mampu mengangkat 30 persen dari tenaga kerja kontrak daerah,” tuturnya.

Dengan peningkatan yang signifikan dalam ADD dan insentif aparatur desa, serta keberhasilan mengatasi defisit APBD, Kutim menunjukkan kemajuan yang pesat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. **(prokutim/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, ADD dan Insentif Aparatur Desa Naik, 08/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK 145/2023) bahwa dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) PMK 145/2023 diatur sebagai berikut
 - (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kinerja keuangan, tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan desa, penganggaran dana desa yang ditentukan penggunaannya untuk prioritas nasional, dan/ atau penghargaan yang diperoleh oleh desa dari kementerian negara/lembaga.
 - (5) Insentif desa dibagikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).